

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Analisis Statistik Deskriptif

Dalam penelitian yang memiliki data berjumlah 1750 perusahaan ini, gambaran variabel – variabel secara keseluruhan akan diperoleh melalui analisis statistik deskriptif. Dalam penelitian ini, terdapat variabel berupa data dengan skala nominal yang akan digambarkan melalui frekuensinya yaitu variabel pengungkapan kebijakan antikorupsi, kepemilikan pemerintah, *government tenders*, kepemilikan asing, *international operations*, keanggotaan UNGC, komite tata kelola, dan kualitas audit, kemudian terdapat pula variabel berupa data dengan skala rasio yang akan digambarkan melalui nilai maksimal, nilai minimal, nilai rata-rata, dan juga nilai standar deviasi yaitu variabel independensi dewan komisaris. Berikut adalah tabel dari hasil penggambaran analisis statistik deskriptif:

Tabel 4.1 Statistik Deskriptif untuk Pengungkapan Kebijakan Antikorupsi

Kebijakan Anti Korupsi					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	714	40.8	40.8	40.8
	Ya	1036	59.2	59.2	100.0
	Total	1750	100.0	100.0	

Sumber : Data sekunder diolah (2021)

Berdasarkan tabel 4.1 tersebut, dapat diketahui bahwa dari 1750 perusahaan yang menjadi data penelitian, maka sebanyak 714 perusahaan tidak mengungkapkan kebijakan antikorupsi (40,8%) dan sebanyak 1036 perusahaan telah melakukan pengungkapan kebijakan antikorupsi (59,2%). Hal ini mengindikasikan bahwa selama periode 2017-2019, perusahaan yang cenderung melakukan pengungkapan kebijakan antikorupsi sudah lebih banyak dibandingkan perusahaan yang belum melakukan pengungkapan kebijakan antikorupsi.

Tabel 4.2 Statistik Deskriptif untuk Kepemilikan Pemerintah

Kepemilikan Pemerintah					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	tidak	1607	91.8	91.8	91.8
	ya	143	8.2	8.2	100.0
	Total	1750	100.0	100.0	

Sumber : Data sekunder diolah (2021)

Berdasarkan tabel 4.2 tersebut, dapat diketahui bahwa dari 1750 perusahaan yang menjadi data penelitian, maka sebanyak 1607 perusahaan tidak terdapat kepemilikan pemerintah dalam usahanya (91,8%) dan sebanyak 143 perusahaan terdapat kepemilikan pemerintah dalam usahanya (8,2%). Hal ini mengindikasikan bahwa selama periode 2017-2019,

perusahaan dengan kepemilikan pemerintah cenderung lebih sedikit dibandingkan perusahaan tanpa kepemilikan pemerintah dalam usahanya.

Tabel 4.3 Statistik Deskriptif *Government Tenders*

Government Tenders					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	tidak	1341	76.6	76.6	76.6
	ya	409	23.4	23.4	100.0
	Total	1750	100.0	100.0	

Sumber : Data sekunder diolah (2021)

Berdasarkan tabel 4.3 tersebut, dapat diketahui bahwa dari 1750 perusahaan yang menjadi data penelitian, maka sebanyak 1341 perusahaan tidak memiliki *government tenders* (76,6%) dan sebanyak 409 perusahaan memiliki *government tenders* (23,4%). Hal ini mengindikasikan bahwa selama periode 2017-2019, perusahaan yang memiliki *government tenders* cenderung lebih sedikit dibandingkan dengan perusahaan yang tidak memiliki *government tenders*.

Tabel 4.4 Statistik Deskriptif Kepemilikan Asing

Kepemilikan Asing					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	tidak	258	14.7	14.7	14.7
	ya	1492	85.3	85.3	100.0
	Total	1750	100.0	100.0	

Sumber : Data sekunder diolah (2021)

Berdasarkan tabel 4.4 tersebut, dapat diketahui bahwa dari 1750 perusahaan yang menjadi data penelitian, maka sebanyak 258 perusahaan tidak terdapat kepemilikan asing dalam usahanya (14,7%) dan sebanyak 1492 perusahaan terdapat kepemilikan asing dalam usahanya (85,3%). Hal ini mengindikasikan bahwa selama periode 2017-2019, perusahaan dengan kepemilikan asing jauh lebih banyak dibandingkan perusahaan tanpa kepemilikan asing dalam usahanya.

Tabel 4.5 Statistik Deskriptif *International Operations*

International Operations					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	tidak	540	30.9	30.9	30.9
	ya	1210	69.1	69.1	100.0
	Total	1750	100.0	100.0	

Sumber : Data sekunder diolah (2021)

Berdasarkan tabel 4.5 tersebut, dapat diketahui bahwa dari 1750 perusahaan yang menjadi data penelitian, maka sebanyak 540 perusahaan tidak melibatkan rekan bisnis asing dalam kegiatan bisnisnya (30,9%) dan sebanyak 1210 perusahaan melibatkan rekan bisnis asing dalam kegiatan bisnisnya (69,1%). Hal ini mengindikasikan bahwa selama periode 2017-2019, perusahaan yang melibatkan rekan bisnis asing dalam kegiatan bisnisnya lebih besar dari perusahaan yang tidak melibatkan rekan bisnis asing dalam kegiatan bisnisnya.

Tabel 4.6 Statistik Deskriptif Keanggotaan UNGC

Keanggotaan UNGC					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	tidak	1720	98.3	98.3	98.3
	Ya	30	1.7	1.7	100.0
	Total	1750	100.0	100.0	

Sumber : Data sekunder diolah (2021)

Berdasarkan tabel 4.6 tersebut, dapat diketahui bahwa dari 1750 perusahaan yang menjadi data penelitian, maka sebanyak 1720 perusahaan tidak tergabung dalam keanggotaan UNGC (98,3%) dan sebanyak 30 perusahaan tergabung dalam keanggotaan UNGC (1,7%). Hal ini mengindikasikan bahwa selama periode 2017-2019, perusahaan yang tergabung dalam keanggotaan UNGC sangat kecil jumlahnya dibandingkan dengan perusahaan yang tidak tergabung dalam keanggotaan UNGC.

Tabel 4.7 Statistik Deskriptif Komite Tata Kelola

Komite Tata Kelola					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	tidak	1536	87.8	87.8	87.8
	Ya	214	12.2	12.2	100.0
	Total	1750	100.0	100.0	

Sumber : Data sekunder diolah (2021)

Berdasarkan tabel 4.7 tersebut, dapat diketahui bahwa dari 1750 perusahaan yang menjadi data penelitian, maka sebanyak 1536 perusahaan tidak memiliki komite tata kelola dalam struktur organisasinya (87,8%) dan sebanyak 214 perusahaan telah memiliki komite tata kelola dalam struktur

organisasinya (12,2%). Hal ini mengindikasikan bahwa selama periode 2017-2019, perusahaan yang telah memiliki komite tata kelola dalam struktur organisasinya masih relatif kecil dibandingkan dengan perusahaan yang tidak memiliki komite tata kelola dalam struktur organisasinya.

Tabel 4.8 Statistik Deskriptif Independensi Dewan Komisaris

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Independensi Dewan Komisaris	1750	.000	1.000	.428	.120
Valid N (listwise)	1750				

Sumber : Data sekunder diolah (2021)

Berdasarkan tabel 4.8 tersebut, nilai minimal independensi dewan komisaris sebesar 0.000, hal ini dikarenakan terdapat perusahaan yang tidak memiliki komisaris independen. Perusahaan tersebut adalah PT Intikeramik Almasari Industri, Tbk. (IKAI) yang pada tahun 2017 hanya memiliki 1 presiden komisaris dan 1 komisaris tanpa mencatatkan keberadaan dewan komisaris independen dalam perusahaannya. Kemudian nilai maksimal independensi dewan komisaris adalah sebesar 1.000, hal ini mengindikasikan bahwa seluruh dewan komisaris dalam perusahaan sekaligus juga menjabat sebagai komisaris independen. Perusahaan tersebut adalah PT Hexindo Adiperkasa, Tbk. (HEXA), Bentoel Internasional Investama, Tbk. (RMBA), dan Bank Nationalnobu, Tbk (NOBU). yang

selama periode 2017-2019 memiliki nilai independensi dewan komisaris sebesar 1.000, kemudian PT Star Pasific, Tbk. (LPLI) yang pada tahun 2018 memiliki independensi dewan komisaris sebesar 1.000 dan Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk. (BEKS) yang pada tahun 2019 memiliki nilai independensi sebesar 1.000. Kemudian untuk nilai rata-rata dari variabel independensi dewan komisaris adalah 0.428 yang berarti perusahaan yang termasuk dalam data penelitian ini rata-rata memiliki 42.8% komisaris independen dari total dewan komisaris dalam perusahaan dan standar deviasi dari independensi dewan komisaris ini adalah sebesar 0.120 atau lebih kecil dari nilai rata-rata independensi dewan komisaris, hal ini mengindikasikan bahwa penyebaran data sampel tidak terlalu bervariasi atau dapat dikatakan hampir sama.

Tabel 4.9 Statistik Deskriptif Kualitas Audit

Kualitas Audit					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	tidak	1156	66.1	66.1	66.1
	Ya	594	33.9	33.9	100.0
	Total	1750	100.0	100.0	

Sumber : Data sekunder diolah (2021)

Berdasarkan tabel 4.9 tersebut, dapat diketahui bahwa dari 1750 perusahaan yang menjadi data penelitian, maka sebanyak 1156 perusahaan tidak bekerja sama dengan auditor dari KAP *Big-4* (66,1%) dan sebanyak 594 perusahaan telah bekerjasama dengan auditor dari KAP *Big-4* untuk

mengaudit laporan keuangannya (33,9%). Hal ini mengindikasikan bahwa selama periode 2017-2019, jumlah yang lebih sedikit dimiliki oleh perusahaan dengan kualitas audit yang lebih baik atau telah diaudit oleh KAP *Big-4*.

4.2 Uji Kelayakan Model Regresi

Uji kelayakan ini bertujuan memastikan ketepatan dan kemampuan model regresi dalam menjelaskan data penelitian. Uji kelayakan model regresi logistik menggunakan *Chi-Square Goodness-of-Fit Test*. Apabila pengujian ini menunjukkan tingkat alfa kurang dari 0,05 atau 5% maka dapat diartikan bahwa model regresi logistik telah memiliki kemampuan yang cukup dalam menjelaskan data penelitian dan begitupula sebaliknya. Berikut hasil dari uji kelayakan keseluruhan model regresi menggunakan *Chi-Square Goodness-of-Fit Test* :

Tabel 4.10 Tabel Uji Kelayakan Model Regresi

Omnibus Tests of Model Coefficients				
		Chi-square	Df	Sig.
Step 1	Step	278.868	8	.000
	Block	278.868	8	.000
	Model	278.868	8	.000

Sumber : Data sekunder diolah (2021)

Berdasarkan tabel 4.10 tersebut, maka terlihat bahwa dalam penelitian ini, signifikansi menunjukkan 0.000 yang berarti lebih kecil dari tingkat alfa 0.05 sehingga dapat dikatakan bahwa model regresi logistik

telah memiliki kemampuan yang layak dalam menjelaskan data penelitian dan dapat melanjutkan proses pengujian selanjutnya.

4.3 Uji Kelayakan Keseluruhan Model Regresi

Pengujian yang dilakukan adalah menguji hipotesis null menggunakan *Hosmer and Lemeshow Goodness-of-Fit Test*. Apabila pengujian ini menunjukkan tingkat alfa senilai kurang dari 0,05 atau 5% maka dapat diartikan bahwa model regresi logistik belum memiliki kemampuan yang cukup dalam menjelaskan data penelitian dan begitupula sebaliknya. Berikut hasil dari uji kelayakan keseluruhan model regresi menggunakan *Hosmer and Lemeshow Goodness-of-Fit Test* :

Tabel 4.11 Tabel Uji Kelayakan Keseluruhan Model Regresi

Hosmer and Lemeshow Test			
Step	Chi-square	Df	Sig.
1	15.362	8	.052

Sumber : Data sekunder diolah (2021)

Berdasarkan tabel 4.11 tersebut, maka terlihat bahwa dalam penelitian ini, signifikansi menunjukkan 0.052 yang berarti lebih besar dari tingkat alfa 0.05 sehingga dapat dikatakan bahwa model regresi logistik telah memiliki kemampuan yang cukup dalam menjelaskan keseluruhan data penelitian.

4.4 Uji Koefisien Determinasi

Uji koefisien determinasi dapat menggunakan uji *Nagelkerke R²* yang akan menginformasikan besarnya kemampuan variabel independen dalam penelitian ini dalam keterkaitannya terhadap variabel dependen apabila terdapat dua atau lebih variabel independen dalam penelitian. Berikut hasil dari uji koefisien determinasi :

Tabel 4.12 Tabel Uji Koefisien Determinasi

Model Summary			
Step	-2 Log likelihood	Cox & Snell R Square	Nagelkerke R Square
1	2087.560 ^a	.147	.199
a. Estimation terminated at iteration number 5 because parameter estimates changed by less than .001.			

Sumber : Data sekunder diolah (2021)

Berdasarkan tabel 4.12 tersebut, maka terlihat bahwa dalam penelitian ini, nilai *Nagelkerke R Square* menunjukkan 0.199 atau 19.9%, hal ini mengindikasikan bahwa kemampuan variabel independen dalam penelitian ini dalam kaitannya terhadap variabel dependen adalah sebesar 19.9%. Sedangkan sebesar 80.1% yaitu sianya dijelaskan oleh faktor lain yang berada di luar penelitian.

4.5 Uji Ketepatan Pengklasifikasian

Uji ketepatan pengklasifikasian akan menghasilkan output berupa tabel klasifikasi. Apabila nilai persentase keseluruhan dari output tersebut menunjukkan nilai yang tinggi maka berarti tingkat kemampuan pengklasifikasian data menurut model regresi logistik juga semakin tinggi.

Berikut hasil dari uji ketepatan pengklasifikasian data penelitian ini:

Tabel 4.13 Tabel Uji Ketepatan Pengklasifikasian

Classification Table ^a					
	Observed		Predicted		
			Kebijakan Anti Korupsi		Percentage Correct
			Tidak	Ya	
Step 1	Kebijakan	Tidak	251	463	35.2
	Anti Korupsi	Ya	125	911	87.9
	Overall Percentage				66.4

a. The cut value is .500

Sumber : Data sekunder diolah (2021)

Berdasarkan tabel 4.13 tersebut, maka terlihat bahwa dalam penelitian ini, nilai persentase keseluruhan dari output tersebut adalah sebesar 66.4% yang mengindikasikan bahwa menurut model regresi logistik yang digunakan dalam penelitian ini, rata-rata ketepatan pengklasifikasian data cukup tinggi.

4.6 Uji Hipotesis

Setelah melakukan berbagai pengujian dan menunjukkan hasil yang baik, maka selanjutnya adalah melakukan uji hipotesis. Dalam penelitian ini,

uji hipotesis akan dilakukan dengan analisis regresi logistik dikarenakan variabel dependen dalam penelitian ini disajikan dengan data yang terdiri atas dua kategori yaitu perusahaan yang cenderung mengungkapkan kebijakan anti korupsi dan perusahaan yang cenderung tidak mengungkapkan kebijakan anti korupsi. Penelitian satu arah ini akan menggunakan uji *Wald Statistic* dalam pengujian hipotesisnya dan berikut hasil uji hipotesisnya :

Tabel 4.14 Tabel Uji Hipotesis

		Variables in the Equation							
		B	S.E.	Wald	df	Sig.	Exp(B)	Sig/2	Hasil
Step 1 ^a	Kepemilikan Pemerintah	.788	.274	8.245	1	.004	2.198	.002	DITERIMA
	Government Tenders	.372	.145	6.624	1	.010	1.451	.005	DITERIMA
	Kepemilikan Asing	1.481	.161	84.622	1	.000	4.396	.000	DITERIMA
	International Operation	.241	.119	4.128	1	.042	1.273	.021	DITERIMA
	Keanggotaan UNGC	.734	.448	2.686	1	.101	2.083	.051	DITOLAK
	Komite Tata Kelola	1.336	.218	37.541	1	.000	3.804	.000	DITERIMA
	Independensi Dewan Komisaris	.471	.453	1.083	1	.298	1.602	.148	DITOLAK
	Kualitas Audit	.478	.121	15.555	1	.000	1.612	.000	DITERIMA
	Constant	- 1.677	.258	42.144	1	.000	.187	.000	
a. Variable(s) entered on step 1: KepemilikanPemerintah, TenderPemerintah, KepemilikanAsing, InternationalOperation, KeanggotaanUNGC, IndependensiDK, KomiteTataKelola, KualitasAudit.									

Sumber : Data sekunder diolah (2021)

Berdasarkan tabel tersebut, maka terlihat bahwa dalam penelitian ini terbentuk model regresi seperti berikut:

$$\text{Ln} \frac{p}{p-1} = -1.677 + 0.788\text{GO} + 0.372\text{GT} + 1.481\text{FO} + 0.241\text{INO} + 0.734\text{UNGC} + 1.336\text{KT} + 0.471\text{INDP} + 0.478\text{KA}$$

Berikut hasil pengujian hipotesis berdasarkan kriteria-kriteria yang tersaji dalam tabel 4.14:

1. Hipotesis Pertama

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pada tabel 4.14, hipotesis pertama diterima yaitu kepemilikan pemerintah berpengaruh positif terhadap pengungkapan kebijakan antikorupsi. Hal ini terlihat pada kolom sig/2 menunjukkan nilai 0.002 yang lebih kecil dari alfa 0.05 dengan nilai koefisien variabel sebesar 0.788 artinya kepemilikan pemerintah berpengaruh positif terhadap pengungkapan kebijakan antikorupsi.

2. Hipotesis Kedua

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pada tabel 4.14, hipotesis kedua diterima yaitu *government tenders* berpengaruh positif terhadap pengungkapan kebijakan antikorupsi. Hal ini terlihat pada kolom sig/2 menunjukkan nilai 0.005 yang lebih kecil dari alfa 0.05 dan nilai koefisien variabel sebesar 0.372 yang artinya

government tenders berpengaruh positif terhadap pengungkapan kebijakan antikorupsi.

3. Hipotesis Ketiga

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pada tabel 4.14, hipotesis ketiga diterima yaitu kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap pengungkapan kebijakan antikorupsi. Hal ini terlihat pada kolom sig/2 menunjukkan nilai 0.000 yang lebih kecil dari alfa 0.05 dan nilai koefisien variabel sebesar 1.481 yang artinya kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap pengungkapan kebijakan antikorupsi.

4. Hipotesis Keempat

Berdasarkan tabel 4.14, hipotesis keempat diterima yaitu *international operations* berpengaruh positif terhadap pengungkapan kebijakan antikorupsi. Hal ini terlihat pada kolom sig/2 menunjukkan nilai 0.021 yang lebih kecil dari alfa 0.05 dan nilai koefisien variabel sebesar 0.241 yang artinya *international operations* berpengaruh positif terhadap pengungkapan kebijakan antikorupsi.

5. Hipotesis Kelima

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pada tabel 4.14, hipotesis kelima yaitu keanggotaan UNGC berpengaruh positif terhadap pengungkapan kebijakan antikorupsi, hasilnya adalah ditolak. Hal ini terlihat pada kolom sig/2 menunjukkan nilai 0.051

yang lebih besar dari alfa 0.05 yang menunjukkan bahwa keanggotaan UNGC tidak berpengaruh terhadap pengungkapan kebijakan antikorupsi.

6. Hipotesis Keenam

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pada tabel 4.14, hipotesis keenam diterima yaitu komite tata kelola berpengaruh positif terhadap pengungkapan kebijakan antikorupsi. Hal ini terlihat pada kolom $\text{sig}/2$ menunjukkan nilai 0.000 yang lebih kecil dari alfa 0.05 dan nilai koefisien variabel sebesar 1.336 yang artinya komite tata kelola berpengaruh positif terhadap pengungkapan kebijakan antikorupsi.

7. Hipotesis Ketujuh

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pada tabel 4.14, hipotesis ketujuh yaitu independensi dewan komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan kebijakan antikorupsi, hasilnya adalah ditolak. Hal ini terlihat pada kolom $\text{sig}/2$ menunjukkan nilai 0.148 yang lebih besar dari alfa 0.05 yang menunjukkan bahwa independensi dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap pengungkapan kebijakan antikorupsi.

8. Hipotesis Kedelapan

Berdasarkan pengujian hipotesis pada tabel 4.14, hipotesis kedelapan diterima yaitu kualitas audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan kebijakan antikorupsi. Hal ini terlihat pada kolom

sig/2 menunjukkan nilai 0.000 yang lebih kecil dari alfa 0.05 dan nilai koefisien variabel sebesar 0.478 yang artinya kualitas audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan kebijakan antikorupsi.

4.7 Pembahasan

4.7.1 Pengaruh Kepemilikan Pemerintah Terhadap Pengungkapan Kebijakan Antikorupsi

Berdasarkan informasi tabel 4.14, kepemilikan pemerintah berpengaruh positif terhadap pengungkapan kebijakan antikorupsi. Hal ini ditunjukkan dari nilai sig/2 sebesar 0.002 dan nilai beta positif sebesar 0.788.

Pada dasarnya, perusahaan yang terdapat kepemilikan pemerintah dalam bisnisnya cenderung sensitif secara politik karena mereka lebih terlihat di mata publik sehingga memunculkan harapan publik terhadap perusahaan tersebut untuk menyadari tugasnya. Hal tersebut membuat perusahaan dengan kepemilikan pemerintah akan cenderung lebih tertekan dalam pengungkapan informasi tambahan yang dibutuhkan pemegang kepentingan. Tekanan tersebut akan memaksa perusahaan menjadi lebih transparan agar kinerjanya terlihat baik di mata publik, sehingga dengan adanya kepemilikan pemerintah dalam suatu perusahaan maka dapat berpengaruh positif pada perusahaan untuk cenderung mengungkapkan kebijakan antikorupsi.

Hal ini didukung oleh penelitian terdahulu dari Amran & Devi (2008) yang menemukan hubungan positif antara kepemilikan pemerintah dengan tingkat pelaporan sosial di Malaysia, kemudian didukung juga oleh Cahaya (2012) yang menyatakan bahwa terdapat hubungan positif antara kepemilikan pemerintah sebagai salah satu tekanan *coercive* terhadap pengungkapan informasi yang dilakukan perusahaan.

4.7.2 Pengaruh *Government Tenders* Terhadap Pengungkapan Kebijakan Antikorupsi

Berdasarkan informasi tabel 4.14, *government tenders* berpengaruh positif terhadap pengungkapan kebijakan antikorupsi. Hal ini ditunjukkan dari nilai sig/2 sebesar 0.005 dan nilai beta positif sebesar 0.372.

Government tenders sendiri merupakan kondisi dimana perusahaan memiliki kontrak, proyek, maupun tender dari pemerintah dalam menjalankan bisnisnya sehingga akan lebih memberi tekanan pada perusahaan untuk memiliki tanggungjawab yang lebih besar dimata publik salah satunya dengan melakukan pengungkapan kebijakan antikorupsi sehingga perusahaan dapat terhindar dari resiko-resiko seperti adanya ketidakpercayaan dengan lebih menunjukkan kinerja yang baik dan transparan. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian sebelumnya oleh Amran dan Devi (2008) dan Amran dan Haniffa

(2011) yang menyatakan bahwa tender pemerintah berpengaruh positif terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan di Malaysia.

4.7.3 Pengaruh Kepemilikan Asing Terhadap Pengungkapan Kebijakan

Antikorupsi

Berdasarkan informasi tabel 4.14, kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap pengungkapan kebijakan antikorupsi. Hal ini ditunjukkan dari nilai sig/2 sebesar 0.000 dan nilai beta positif sebesar 1.481.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa tekanan koersif juga dapat dicerminkan oleh variabel kepemilikan asing. Pada umumnya, kepemilikan asing menunjukkan bahwa suatu entitas memiliki pengaruh yang lebih kuat dalam praktik asing salah satunya dikarenakan jarak geografis, sehingga pemegang saham asing cenderung menuntut pengungkapan informasi yang lebih tinggi karena adanya pemisahan geografis dan pemegang saham asing yang biasanya berasal dari negara maju cenderung lebih peduli dan peka terhadap akuntabilitas perusahaan demi menciptakan bisnis yang berkelanjutan. Hal tersebut mendorong perusahaan dengan kepemilikan asing cenderung akan melakukan pengungkapan kebijakan antikorupsi sebagai salah satu bentuk akuntabilitas mereka.

Hal ini didukung dengan pernyataan Purwanto (2020) yakni adanya kepemilikan asing dalam saham perusahaan akan berpengaruh

pada pengungkapan tanggung jawab yang dianggap lebih *concern*, dikarenakan pihak asing yang lebih ahli dalam bidang akuntansi dan pengungkapannya. Kemudian didukung pula oleh hasil penelitian sebelumnya oleh Muttakin & Subramaniam, (2015) dan Cahaya. et al. (2017) tentang kepemilikan asing terhadap pengungkapan informasi perusahaan adalah berhubungan positif.

4.7.4 Pengaruh *International Operations* Terhadap Pengungkapan Kebijakan Antikorupsi

Berdasarkan informasi tabel 4.14, *international operations* berpengaruh positif terhadap pengungkapan kebijakan antikorupsi. Hal ini ditunjukkan dari nilai sig/2 sebesar 0.021 dan nilai beta positif sebesar 0.241.

Variabel keempat ini yaitu *international operations* yang merupakan kegiatan operasional perusahaan yang melibatkan rekan bisnis asing. Seperti variabel kepemilikan asing, rekan bisnis asing juga memiliki kecenderungan untuk memberikan tekanan koersif kepada perusahaan untuk mengungkapkan kebijakan berkelanjutan seperti antikorupsi dan CSR. Hal ini dikarenakan pada umumnya, *international operations* ini akan berhubungan dengan negara maju yang lebih peduli akan nilai akuntabilitas dan transparansi salah satunya dapat dilakukan dalam bentuk pengungkapan kebijakan antikorupsi. Selain itu, dengan memiliki rekan bisnis asing sebagai penyedia sumber daya maka

terdapat kemungkinan terjadinya benturan kepentingan maupun memunculkan informasi yang asimetris sehingga terdapat celah untuk terjadinya tindak korupsi, dengan melakukan pengungkapan kebijakan antikorupsi, maka hal ini dapat menjadi salah satu solusi pencegahan dari resiko-resiko *agency problem* tersebut.

Pernyataan ini didukung oleh penelitian Amran & Haniffa (2011) membuktikan bahwa beberapa perusahaan di Malaysia yang berkerjasama dengan rekan bisnis dari Amerika Serikat, Inggris, dan Jepang menjadikan ISO 14001 sebagai patokan dalam pelaporan CSR. Sehingga berdasarkan teori dan penelitian terdahulu maka ada kemungkinan pihak asing dapat memberikan tekanan formal kepada perusahaan untuk mengadopsi praktik tertentu salah satunya pengungkapan kebijakan antikorupsi.

4.7.5 Pengaruh Keanggotaan UNGC Terhadap Pengungkapan Kebijakan Antikorupsi

Berdasarkan informasi tabel 4.14, keanggotaan UNGC tidak berpengaruh terhadap pengungkapan kebijakan antikorupsi. Hal ini ditunjukkan dari nilai sig/2 sebesar 0.051 yang lebih besar dari 0.05 dan nilai beta sebesar 0.734.

Hal ini menggambarkan bahwa menjadi anggota dari *United Nations Global Compact* tidak berpengaruh pada kecenderungan perusahaan untuk melakukan pengungkapan kebijakan antikorupsi.

Variabel kelima yang juga dapat menggambarkan tekanan koersif adalah keanggotaan UNGC karena dengan menjadi anggota UNGC maka dapat memicu perubahan perilaku organisasi termasuk pengaruh ajakan untuk mengubah praktik organisasi menjadi lebih transparan dengan melakukan pengungkapan kebijakan antikorupsi.

Namun, dalam penelitian ini, didapatkan hasil bahwa UNGC ternyata tidak menjadi suatu konstituen penguasa yang mampu mempengaruhi perusahaan yang menjadi anggotanya untuk melakukan upaya pemberantasan korupsi. Hal ini dapat dikarenakan antikorupsi hanya menjadi prinsip dalam keanggotaan UNGC dan belum menjadi suatu bentuk keharusan untuk dilakukan oleh para anggota UNGC sehingga anggota UNGC hanya secara sukarela melakukan pengungkapan kebijakan antikorupsi. Dengan bentuk sukarela tersebut, maka tidak semua anggota UNGC melakukan pengungkapan kebijakan antikorupsi sehingga keanggotaan UNGC tidak berpengaruh terhadap pengungkapan kebijakan antikorupsi. Hasil didukung penelitian yang dilakukan oleh Sari, dkk (2020) yang menyatakan bahwa tidak ada pengaruh keanggotaan UNGC terhadap pengungkapan kebijakan antikorupsi.

4.7.6 Pengaruh Komite Tata Kelola Terhadap Pengungkapan Kebijakan

Antikorupsi

Berdasarkan informasi tabel 4.14, komite tata kelola berpengaruh positif terhadap pengungkapan kebijakan antikorupsi. Hal ini ditunjukkan dari nilai sig/2 sebesar 0.000 dan nilai beta positif sebesar 1.336.

Dalam penelitian ini, peneliti menambahkan variabel komite tata kelola yang merupakan komite yang anggotanya berasal dari dewan direksi perusahaan dan memiliki tujuan yakni memastikan perusahaan dalam melakukan usahanya sesuai dengan aturan tata kelola yang telah diterapkan sehingga sangat penting keberadaan komite tata kelola dalam suatu perusahaan. Dengan adanya komite tata kelola, maka pengungkapan kebijakan antikorupsi sebagai salah satu cerminan tata kelola yang baik dapat lebih cenderung dilakukan oleh perusahaan.

Hal ini didukung oleh penelitian terdahulu oleh Malau (2017) yang menemukan bahwa keberadaan komite tata kelola berhubungan positif terhadap laporan keberlanjutan. Selain itu, Silvia dan Hartomo (2019) juga menemukan bahwa komite tata kelola menjadi salah satu antecedent yang berpengaruh positif terhadap pengungkapan kebijakan anti korupsi di perusahaan.

4.7.7 Pengaruh Independensi Dewan Komisaris Terhadap Pengungkapan Kebijakan Antikorupsi

Berdasarkan informasi tabel 4.14, independensi dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap pengungkapan kebijakan antikorupsi. Hal ini ditunjukkan dari nilai $\text{sig}/2$ sebesar 0.148 dan nilai beta sebesar 0.471.

Hasil dari pengujian tersebut mengindikasikan bahwa perbandingan antara jumlah dewan komisaris independen dengan jumlah keseluruhan dewan komisaris tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan kebijakan antikorupsi yang dilakukan oleh perusahaan. Meskipun dengan adanya dewan komisaris independen dalam proporsi dewan komisaris, maka *interest conflict* dapat teratasi dan pihak direksi dapat mengambil keputusan secara lebih objektif sehingga dapat meningkatkan transparansi dalam tata kelola perusahaan serta mencegah adanya celah tindakan korupsi, namun dalam penelitian ini, uji hipotesis menunjukkan hal yang berbeda.

Hal ini mungkin dikarenakan dewan komisaris independen belum banyak berperan dalam pengungkapan kebijakan antikorupsi yang dilakukan perusahaan, seperti misalnya salah satu perusahaan yang memiliki nilai maksimal independensi dewan komisaris sebesar 1 yaitu PT Bentoel Internasional Investama, Tbk yang meskipun memiliki nilai maksimal dalam independensi dewan komisaris namun perusahaan ini tidak mengungkapkan kebijakan antikorupsi. Hasil pengujian ini didukung oleh penelitian Krisna dan Suhardianto (2016) dan Hartomo dan Purnamasari (2020) yang menyatakan bahwa tidak ada pengaruh

independensi dewan komisaris terhadap pengungkapan antikorupsi perusahaan di beberapa sektor di BEI.

4.7.8 Pengaruh Kualitas Audit Terhadap Pengungkapan Kebijakan Antikorupsi

Berdasarkan informasi tabel 4.14, kualitas audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan kebijakan antikorupsi. Hal ini ditunjukkan dari nilai sig/2 sebesar 0.000 dan nilai beta positif sebesar 0.478.

Dalam penelitian ini, pengukuran kualitas audit dapat dicerminkan pada ukuran kantor akuntan publik. Apabila KAP yang mengaudit tergolong sebagai *Big 4* maka menunjukkan reputasi yang lebih meyakinkan dan berkualitas daripada KAP yang tidak tergolong sebagai *Big 4*. Perusahaan yang memiliki kualitas audit yang baik akan lebih terdorong melakukan pengungkapan informasi terutama yang berkaitan dengan upaya pencegahan korupsi. Hal ini dikarenakan KAP *Big 4* menjunjung tinggi pemberantasan korupsi sehingga berpengaruh pada pengungkapan kebijakan antikorupsi yang dilakukan oleh kliennya.

Hasil pengaruh signifikan dan positif dalam penelitian ini sesuai dengan sebuah studi yang dilakukan pada 2010 oleh *Transparency International*, terbukti bahwa kualitas audit dari KAP *Big 4* di 57 negara berkaitan erat dengan tingkat korupsi negara.

Healy & Serafeim (2013) juga menyatakan bahwa KAP *Big 4* telah menuntut perusahaan yang menjadi kliennya untuk lebih kuat dalam mengungkapkan kebijakan anti korupsi demi melindungi reputasi KAP *Big 4* tersebut terutama dari ancaman-ancaman litigasi. Penelitian sebelumnya yang juga mendukung hipotesis ini adalah penelitian oleh Silvia dan Hartomo (2019) yang menunjukkan bahwa kualitas audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan kebijakan anti korupsi di perusahaan.

